

# **LAPORAN KINERJA BAGIAN KERJASAMA TAHUN 2018**



**BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA  
SEKRETARIAT KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan dan melaporkan segala kegiatan dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi delegasi wewenang sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini disajikan gambaran secara obyektif informasi penerapan indikator dalam angka sebagai bentuk pencapaian kinerja di Bagian Administrasi Kerja Sama. Kebenaran data dan angka diolah menjadi bahan evaluasi yang secara terus menerus dikaji agar diperoleh indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung oleh sistem yang memadai. Hal ini sangat diperlukan sebagai kejelasan dari sasaran Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk menjabarkan sesuatu yang akan dicapai saat ini maupun periode yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih ada kekurangannya dan besar harapan kami adanya masukan dari berbagai pihak berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaannya

**KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI KERJA SAMA**



**Drs. ATSALIS SUPRIYANTO, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671130 198809 1 001

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Gambaran Umum .....	2
1. Organisasi Perangkat Daerah .....	3
2. Capaian Kinerja Tahun 2017 .....	6
D. Sistematika .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A. Perencanaan Strategis .....	11
1. Tujuan dan Sasaran .....	11
2. Kebijakan dan Program .....	12
B. Perjanjian Kinerja .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	15
1. Capaian Kinerja .....	15
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	15
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 ..	15
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....	16
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi .....	16
3.. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran .....	18
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	18
3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran.....	18
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	19
B. Realisasi Anggaran .....	19
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
2. Lampiran II Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2018	
3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018	
4. Lampiran IV Perubahan Rencana Strategis (2016-2021)	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Kerja Sama tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Tahun 2018 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 1 (satu) sasaran dengan kategori capaian sasaran berhasil sebanyak 1 (satu) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Tahun 2018 mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

## A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Bab XVII Pasal 363 ayat 1 telah memberikan jalan keluar yaitu *Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan*, yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Malang membentuk bagian yang khusus menangani permasalahan pelaksanaan kerjasama dengan harapan pelaksanaan kerjasama dapat lebih dikembangkan dan berdampak pada peningkatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ada Bagian Administrasi Kerja Sama berusaha melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan semaksimal mungkin guna peningkatan kinerja di Pemerintahan Kabupaten Malang.

Dengan dilatarbelakangi hal tersebut di atas, Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Laporan Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan berdasarkan pada :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan

hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Evaluasi terhadap capaian kinerja ini ditujukan untuk memberikan:

1. Tolak Ukur bagi pencapaian kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Bagian Administrasi Kerja Sama yang sasarannya adalah peningkatan kerja sama diberbagai bidang dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif dan saling menguntungkan.

### **C. GAMBARAN UMUM**

Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada daerah sehingga menjadi otonomi daerah. Dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya.

Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya mempunyai keterbatasan. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut, Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan jalan keluar yaitu daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dan atau pihak ketiga. Guna memudahkan daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain ataupun dengan pihak ketiga, diperlukan lembaga teknis yang menangani kegiatan kerja sama tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah maka dibentuk Bagian Kerjasama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kerjasama.

Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Bagian Kerjasama Setda juga mengalami perubahan diantaranya:

1. pengurangan urusan yang ditangani (urusan kerja sama antar desa);
2. perubahan nomenklatur Bagian dan Sub Bagian (Bagian Kerjasama mengalami perubahan menjadi Bagian Administrasi Kerja Sama);

## **1. Organisasi Perangkat Daerah**

1) Tugas pokok Bagian Administrasi Kerja Sama:

- a. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan kerjasama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kerja sama;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Administrasi Kerja Sama mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan pelaksanaan kerjasama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
- b. pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
- c. pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga lain yang berbadan hukum dalam rangka kerjasama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
- d. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan data kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
- e. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengendalian kerja sama daerah;
- f. penyiapan bahan sosialisasi dan petunjuk pelaksanaan kerjasama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi kerjasama luar negeri dan antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya.

3) Adapun Perangkat Organisasi Bagian Administrasi Kerja Sama antara lain:

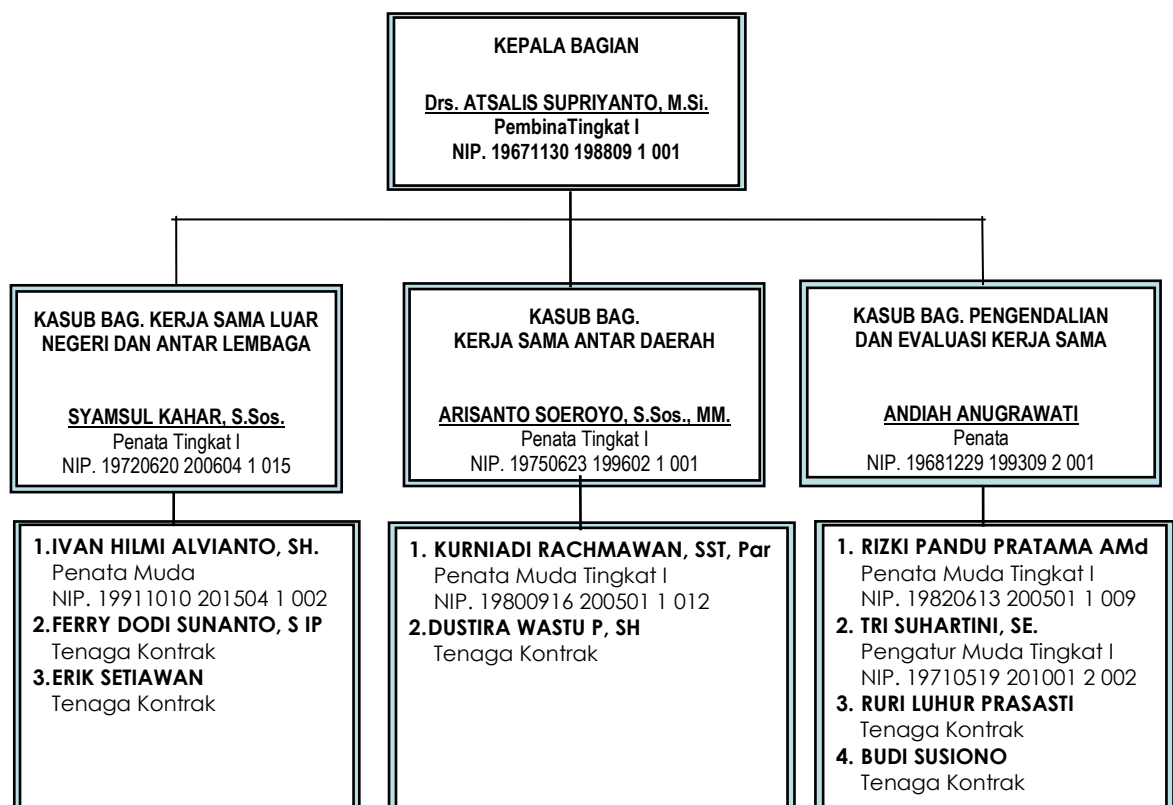
- (1) Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri dan Antar Lembaga mempunyai tugas:



- a. menyusun program kerja Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri dan Antar Lembaga untuk acuan pelaksanaan tugas;
  - b. pelaksanaan fasilitasi kerja sama Luar Negeri dan Antar Lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan pihak luar negeri, dalam rangka pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga lain yang berbadan hukum dalam rangka kerjasama antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data kerjasama luar negeri dan antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
  - f. menyiapkan data monitoring, evaluasi kerjasama luar negeri dan antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Kerja Sama Antar Daerah mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Administrasi Kerja Sama antar Daerah untuk acuan pelaksanaan tugas;
  - b. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
  - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
  - d. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data kerja sama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
  - e. menyiapkan data monitoring dan evaluasi kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
  - f. merumuskan kebijakan penyelesaian perselisihan pelaksanaan kerja sama antar daerah;

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama untuk acuan pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan pengkajian terhadap usulan-usulan kerja sama daerah;
  - c. menyusun bahan koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil kerjasama daerah;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama daerah;
  - e. menyusun dan menganalisa laporan hasil evaluasi kerjasama daerah;
  - f. melaksanakan inventarisasi, sistematika serta pengolahan data kerjasama daerah;
  - g. menyelenggarakan sosialisasi sehubungan dengan peraturan/ kebijakan terkait pelaksanaan kerja sama daerah
  - h. melaksanakan Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Administrasi Kerja Sama;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama sesuai dengan bidang tugasnya.

### STRUKTUR ORGANISASI



Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bagian Administrasi Kerja Sama sampai dengan akhir tahun 2018 didukung sebanyak 13 orang pegawai

dengan kriteria jenis kelamin, kepangkatan dan pendidikan sebagaimana tabel berikut:

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Sub Bagian	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
	Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama	1 orang		1 Orang
1.	Kerja Sama Luar Negeri dan Antar Lembaga	4 orang	-	4 Orang
2.	Kerja Sama Antar Daerah	3 orang	-	3 Orang
3.	Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama	2 orang	3 orang	5 Orang
	<b>J U M L A H</b>	<b>10 orang</b>	<b>3 orang</b>	<b>13 Orang</b>

b. Berdasarkan Golongan Ruang dan Berdasarkan Pendidikan

No	ESELON	GOL / RUANG					STRATA PENDIDIKAN			
		IV	III	II	I	Non gol	SLTA	SARMUD	S-1	S-2
1	III	1								1
2	IV		3					1		2
3	STAF		3	1					4	
4	HONORER					6	3		2	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

a. Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

No	ESELON	DIKLAT KEPEMIMPINAN		
		Diklat Pim IV	Diklat Pim III	Diklat Pim II
1	III	1	1	
2	IV	2		
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	

2. Capaian Kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1.	Melaksanakan Kerjasama Antar Daerah/Luar Negeri/ Lembaga	Persentase peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerjasama Antar Daerah, Luar Negeri dan Lembaga	5%	7,41%

Pada data yang telah dijelaskan diatas diketahui dengan target 5% peningkatan dan realisasi 7,41%, sehingga dapat dikatakan target tercapai, dengan capaian 140% sehingga dapat dikatakan berhasil. Realisasi 7,41% merupakan hasil dari perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mana akan kami sampaikan perhitungannya dalam ***lampiran*** Laporan Kinerja ini. Jika dilihat tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan. Keberhasilan dalam memenuhi target indikator kinerja yang telah dicanangkan dalam peningkatan realisasinya dikarenakan beberapa hal antara lain :

- a. koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran instansi, lembaga baik di dalam atau di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
- b. Perangkat Daerah sudah lebih memahami tata cara pelaksanaan kerjasama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sehingga tugas dan fungsi Bagian Administrasi Kerja Sama dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dalam rangka meminimalisir kemungkinan kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Administrasi Kerja Sama telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran instansi, lembaga baik di dalam atau di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi guna meningkatkan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sehingga tugas pokok dan fungsi bagian kerjasama dapat dilaksanakan secara maksimal.
- c. Mempelajari perubahan Undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama sebagai bahan analisa pelaksanaan kerja sama.

Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Kerjasama Pembangunan. Hal tersebut dikarenakan program tersebut dapat memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan jumlah kerja sama.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pada Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang dalam mencapai target kinerja sesuai yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja adalah :

Program Kerjasama Pembangunan, terdiri dari 4 Kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan.
2. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.
3. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/lembaga.
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Maksud dari program kegiatan di atas adalah untuk menjalin pelaksanaan kerja sama dengan :

- ❖ Wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Malang;
- ❖ Daerah lain baik dari dalam atau diluar provinsi Provinsi Jawa Timur;
- ❖ Badan Usaha/lembaga dari dalam dan Luar Negeri, baik dari pihak Swasta maupun Pemerintah;
- ❖ Negara lain dalam bentuk sisters city dan/atau G to G.

Yang tujuan peningkatan pembangunan di semua bidang sesuai kewenangan otonomi daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Sedangkan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada program tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil dan manfaat dari pelaksanaan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Malang, baik dengan daerah lain, badan usaha/lembaga sehingga kerjasama yang dilaksanakan berdampak positif dan kedepan hasil monitoring dan evaluasi program tersebut sesuai dengan pencapaian target indikator kinerja peningkatan kuantitas kerjasama antar daerah/luar negeri/lembaga.

Dengan demikian secara keseluruhan program dan kegiatan yang ada di Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kab. Malang, utamanya program prioritas/utama sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam usaha pencapaian penetapan kinerja tahun 2017.

#### **D. SISTEMATIKA**

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

##### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
  - 1. Organisasi Perangkat Daerah
  - 2. Capaian Kinerja Tahun 2017
- D. Sistematika

##### **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis
  - 1. Tujuan dan Sasaran
  - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

##### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Bagian Kerjasama

1. Capaian Kinerja Organisasi
    - 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
    - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017
    - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
  2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi
  3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
    - 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
    - 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
    - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran

## **BAB IV : PENUTUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- |              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Lampiran I   | Matriks Renstra Tahun 2016-2021 |
| Lampiran II  | Perjanjian Kinerja Tahun 2018   |
| Lampiran III | Rencana Kinerja Tahun 2018      |
| Lampiran IV  | Pengukuran Kinerja Tahun 2018   |

## A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen rencana strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen rencana strategis memuat pernyataan tujuan dan sasaran serta strategi cara pencapaian tujuan dan sasaran dengan pendekatan analisis lingkungan dan asumsi-asumsi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dokumen rencana strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen organisasi serta bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi baik perubahan yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dengan demikian diharapkan rencana strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman.

### 1. Tujuan Dan Sasaran

Bagian Administrasi Kerja Sama merupakan organisasi unsur dari sekretariat yang fungsinya adalah sebagai staf pendukung (*Supporting Staff*). Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Administrasi Kerja Sama adalah merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 6 tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan urusan Bagian Administrasi Kerja Sama adalah Tujuan 1 (Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat), Sasaran 3 (Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik) dari Misi 02 (Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi).

Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Tujuan Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
2. Mewujudkan kerja sama antar daerah, luar negeri dan lembaga.

Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kerja sama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
2. Terwujudnya kerja sama antar daerah, luar negeri dan lembaga.

## **2. Kebijakan Dan Program**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi, sasaran dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu.

Untuk menjaga konsistensi Misi, Sasaran dan Tujuan tersebut, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan bidang kerja sama Kabupaten Malang selama enam tahun kedepan (2016-2021). Maka Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang telah menetapkan strategi, sebagai berikut :

1. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
2. Integrasi, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai tujuan bersama;
3. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;
4. Simplikasi, adalah upaya perumusan produk dan kebijakan kerja sama dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Dan telah menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Penyusunan kesepakatan bersama maupun perjanjian kerja sama senantiasa mengutamakan partisipasi stakeholder, karena pada prinsipnya setiap stakeholder mempunyai hak untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
- b. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur.



- c. Memperluas jaringan kerja sama dengan mitra kerja sama baik dari dalam dan luar negeri.
- d. Membangun transparansi dalam setiap penyusunan naskah kerja sama, sehingga dapat diakses oleh setiap pihak yang membutuhkan.
- e. Membangun jaringan dengan memanfaatkan Informasi Teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sama.
- f. Membangun sumber daya aparatur Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang yang mempunyai visi strategis (strategic vision) sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.
- g. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan good governance.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2018 Bagian Administrasi Kerja Sama Setda melaksanakan 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

#### I. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Fasilitasi Dan Peningkatan Kerja Sama Daerah;

#### II. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan;
8. Penyediaan Makanan Minuman;
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
14. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
15. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah;
16. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Luar Negeri;

17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

**B. PERJANJIAN KINERJA**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80 %

Perjanjian Kinerja tersebut didukung Program dengan anggaran :

Program	Anggaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 475.893.500,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 66.165.000,-
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 2.500.000,-
4. Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah	Rp. 528.825.500,-
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 1.073.384.000,-</b>

## A. Capaian Kinerja Organisasi

### 1. Capaian Kinerja

#### 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.1  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80%	88%	110%

Perhitungan Realisasi merupakan hasil dari perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mana akan kami sampaikan perhitungannya dalam *lampiran* Laporan Kinerja ini.

#### 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

Gambaran Perbandingan antara Target Kinerja serta Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.2  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI (%)	
		2017	2018	2017	2018
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama		80%		88%

Keterangan : Indikator Kinerja Utama berubah Pada tahun 2017 (Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2018

#### 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Dengan Indikator Kinerja yang demikian Bagian Administrasi Kerja Sama membuat Target Capaian setiap tahun selama 5 (lima) tahun dalam satuan jumlah dokumen kerja sama (terlampir), sehingga didapat jumlah

dokumen kerja sama pada akhir periode RPJMD (2016-2021) sebanyak 348 dokumen

Pada tahun 2018 ini Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten telah dapat melaksanakan targetnya dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari realisasi kinerja dari indikator yang telah ditetapkan semuanya telah tercapai 32%.

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri/Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	100%	17%	88%	47%

## 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Pada data yang telah dijelaskan diatas diketahui bahwa realisasi dan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang terpenuhi dan tercapai 88%. Jika dilihat dari tahun 2017 menunjukkan adanya fluktuasi peningkatan. Keberhasilan dalam memenuhi target indikator kinerja yang telah dicanangkan dalam peningkatan realisasinya dikarenakan beberapa hal antara lain :

- a. terselenggaranya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran instansi, lembaga baik di dalam atau di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
- b. Perangkat Daerah sudah lebih memahami tata cara pelaksanaan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sehingga tugas dan fungsi Bagian Administrasi Kerja Sama dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Administrasi Kerja Sama telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran instansi, lembaga baik di dalam atau di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi guna meningkatkan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

sehingga tugas pokok dan fungsi bagian kerjasama dapat dilaksanakan secara maksimal.

- c. Mempelajari perubahan Undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama sebagai bahan analisa pelaksanaan kerja sama.

Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah. Hal tersebut dikarenakan program tersebut dapat memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan jumlah kerja sama.

Program yang menunjang Keberhasilan pada Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang dalam mencapai target kinerja sesuai yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja adalah Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah, terdiri dari 3 Kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah;
2. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Luar Negeri;
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Maksud dari kegiatan di atas adalah untuk menjalin pelaksanaan kerja sama dengan :

- ❖ Wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Malang;
- ❖ Daerah lain baik dari dalam atau diluar provinsi Provinsi Jawa Timur;
- ❖ Badan Usaha/lembaga dari dalam dan Luar Negeri, baik dari pihak Swasta maupun Pemerintah;
- ❖ Negara lain dalam bentuk sisters city dan/atau G to G.

Yang tujuan peningkatan pembangunan di semua bidang sesuai kewenangan otonomi daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang.

Sedangkan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah pada program tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil dan manfaat dari pelaksanaan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Malang, baik dengan daerah lain, badan usaha/lembaga sehingga kerja sama yang dilaksanakan berdampak positif dan kedepan hasil monitoring dan evaluasi program tersebut sesuai dengan pencapaian target indikator kinerja peningkatan kuantitas kerja sama antar daerah/luar negeri/lembaga.

Dengan demikian secara keseluruhan program dan kegiatan yang ada di Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kab Malang, utamanya program prioritas/utama sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam usaha pencapaian penetapan kinerja tahun 2018.

### 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

#### 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.5

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	Rp. 528.825.500,-	49,27%

#### 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

Tabel 3.6

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80%	88%	110%	528.825.500	525.790.500	97,16%

#### 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	110%	97,16%	0.10%

## B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menggambarkan alokasi anggaran atau belanja yang diperoleh Bagian Kerjasama dibandingkan dengan realisasinya.

Alokasi Anggaran Belanja pada Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Tahun 2018 sebesar Rp1.073.384.000,- dari alokasi tersebut telah terealisasi sebesar Rp1.042.942.992,- atau 97,2 %, dan sisa anggaran sebesar Rp30.441.008,- atau 2,8%.

Secara rinci realisasi keuangan Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang pada Tahun 2018 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.8  
Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2018

Uraian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
<b>BELANJA :</b>	1.073.384.000,-	1.042.942.992,-	30.441.008,-	97,2
<b>Belanja Langsung dengan Program :</b>	1.073.384.000,-	969.082.542,-	30.441.008,-	97,2
1. Administrasi Perkantoran	475.893.500,-	451.456.012,-	24.437.488,-	94,9
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	66.165.000,-	63.661.480,-	2.503.520,-	96,2
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.500.000,-	2.035.000,-	465.000,-	81,4
4. Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah	528.825.500,-	525.790.500,-	3.035.000,-	99,4

## A. TINJAUAN UMUM

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang disusun dalam rangka memenuhi kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala program dan kegiatan dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi delegasi wewenang sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

Sebagaimana dalam penerapan sistem yang baru, dalam penyusunan LKj ini masih membutuhkan persiapan sumberdaya yang dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga sangatlah wajar apabila LKj yang disusun oleh Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang ini masih jauh dari kesempurnaan dan lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran daripada bentuk pemenuhan penilaian tampilan kinerja organisasi. Oleh karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk saran dan kritik untuk perbaikannya.

## B. TINJAUAN KHUSUS

Berangkat dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang dimiliki, obyektifitas informasi penetapan indikator dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang diperoleh kebenaran data dan angka yang didapat diolah menjadi suatu informasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja organisasi Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang.

Informasi yang disusun dalam bentuk LKj ini sangatlah bergantung pada sistem dan aturan-aturan yang ada serta konsistensi terhadap komitmen yang telah dibangun bersama. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja wajib secara terus-menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai sehingga LKj yang disusun nantinya dapat dijadikan media komunikasi yang efektif dan efisien bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauhmana keputusan-keputusan strategis mampu dihasilkan guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi disekitar organisasi.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Lampiran I Matriks Perubahan Renstra Tahun 2016-2021
2. Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2018
3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018
4. Lampiran IV Pengukuran Kinerja Tahun 2018
5. Lampiran Perhitungan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan 2018
6. Lampiran Rekapitulasi Dokumen Kerja Sama Tahun 2018

**MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA  
TAHUN 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula / Rumus	Target Kinerja Sasaran Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mewujudkan kerjasama antar daerah, luar negeri dan lembaga	Terwujudnya kerja sama antar daerah dalam negeri, antar daerah luar negeri dan lembaga	Persentase Peningkatan Kuantitas dan kualitas Kerjasama Antar Daerah/Luar Negeri/ Lembaga	Jumlah KB dan PKS tahun n dikurangi Jumlah KB dan PKS tahun n-1 dibagi Jumlah KB dan PKS tahun n-1 dikali 100%	100% (45 dokumen kerja sama/ 5% peningkatan)	100% (47 dokumen kerja sama/ 5% peningkatan)				
	Terwujudnya Pelaksanaan Kerjasama di Kabupaten Malang yang Efektif dan Saling Menguntungkan di Semua Bidang Kerja Sama	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	Jumlah Naskah Kerja Sama dibagi Jumlah Fasilitasi Kerja Sama dikali 100 %			80% (50 dokumen kerja sama)	80% (52 dokumen kerja sama)	80% (55 dokumen kerja sama)	80% (57 dokumen kerja sama)



# PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raden Panji No. 158 Kepanjen ☎ (0341) 392024  
email: [sekda@malangkab.go.id](mailto:sekda@malangkab.go.id) Website: <http://malangkab.go.id>

**KEPANJEN 65163**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ABDUL HARIS, M. Si  
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. DIDIK BUDI MULJONO, M.T.  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Malang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2018

Pihak Pertama,

**Drs. ABDUL HARIS, M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660311 199203 1 013

Pihak Kedua

**Ir. DIDIK BUDI MULJONO, M.T.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600504 198811 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 451.499.450,-	APBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 57.284.050,-	APBD
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 5.000.000,-	APBD
4. Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah	Rp. 559.600.500,-	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp.1.073.384.000,-</b>	

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama) siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. DIDIK BUDI MULJONO, M.T.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600504 198811 1 001

Malang, Januari 2018

**KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI KERJA SAMA**

**Drs. ABDUL HARIS, M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660311 199203 1 013





# PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raden Panji No. 158 Kapanjen ☎ (0341) 392024  
email: [sekda@malangkab.go.id](mailto:sekda@malangkab.go.id) Website: <http://malangkab.go.id>

**KEPANJEN 65163**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ATSALIS SUPRIYANTO, M.Si.**  
Jabatan : **Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. DIDIK BUDI MULJONO, M.T.**  
Jabatan : **Sekretaris Daerah Kabupaten Malang**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, November 2018

**Pihak Pertama,**

**Pihak Kedua**  
  
**Ir. DIDIK BUDI MULJONO, M.T.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600504 198811 1 001

  
**Drs. ATSALIS SUPRIYANTO, M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196711301988091001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH**

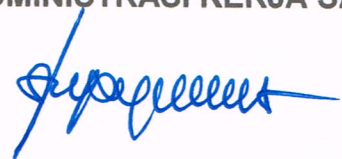
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 475.893.500,-	APBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 66.165.000,-	APBD
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 2.500.000,-	APBD
4. Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah	Rp. 528.825.500,-	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp.1.073.384.000,-</b>	

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama) siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Malang, November 2018

**KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI KERJA SAMA**



**Drs. ATSALIS SUPRIYANTO, M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196711301988091001

**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. DIDIK BUDI MULJONO, M.T.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600504 198811 1 001

## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perangkat Daerah : Bagian Administrasi Kerja Sama Setda  
Tahun : 2018

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Terwujudnya kerja sama antar daerah/ luar negeri/ lembaga di Kabupaten Malang yang efektif dan saling menguntungkan disemua bidang	Persentase kerja sama antar daerah / luar negeri dan lembaga ditindaklanjuti menjadi naskah kerja sama.	5 %

Malang, Januari 2019

**KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI KERJA SAMA  
SETDA KABUPATEN MALANG**



**Drs. ATSALIS SUPRIYANTO, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671130 198809 1 001

## PENGUKURAN KINERJA

Kabupaten : Malang  
Nama Perangkat Daerah : Bagian Administrasi Kerja Sama Setda

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
Terwujudnya kerja sama antar daerah/ luar negeri/ lembaga di Kabupaten Malang yang efektif dan saling menguntungkan disemua bidang	Persentase kerja sama antar daerah/ luar negeri dan lembaga ditindaklanjuti menjadi naskah kerja sama	80 %	88%	110%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp. 1.073.384.000,-  
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp 1.042.942.992,-

Malang, Januari 2019

**KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI KERJA SAMA  
SETDA KABUPATEN MALANG**



**Drs. ATSALIS SUPRIYANTO, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 196711301988091001



**Perhitungan Capaian Kinerja Bagian Administrasi Kerjasama Tahun 2018****Indikator Kinerja Utama Bagian Kerjasama**

Persentase kerja sama antar daerah/luar negeri dan lembaga ditindaklanjuti menjadi naskah kerja sama

=

 $\Sigma$  Naskah Kerja Sama $\Sigma$  Fasilitasi Kerja Sama**Capaian Kinerja**

88%

53

60

**DATA KERJA SAMA DAERAH TAHUN 2018  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

No.	Mitra Kerja	Nomor	Bidang Kerjasama	Jangka Waktu	Ket
1	2	3	4	6	
1	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	Nomor : <u>074/01/35.07.022/2018</u> Nomor : E.5C/028/FIKES-UMM/I/2018	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PRAKTIK KLINIK DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5 TAHUN 03-Jan-18 s.d 03-Jan-23	√
2	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG	Nomor : <u>074/02/35.07.022/2018</u> Nomor : 00265A/UN10.FO8/KS/2018	PERJANJIAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PRAKTIK KLINIK DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5 TAHUN 10-Mar-18 s/d 10-Mar-23	√
3	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	Nomor : <u>120.23/06/033.4/2018</u> Nomor : 120.23/03/35.07.022/2018	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENINGKATAN PROGRAM PUSKESMAS	12 BULAN 02-Jan-18 s/d 02-Jan-19	√
4	UNIVERSITAS MA CHUNG	Nomor : 074/04/35.07.022/2018 Nomor : 012/MACHUNG/MOU/VIII/2018	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5 TAHUN 04-Sep-18 s/d 04-Sep-23	√
5	KOPERASI UNIT DESA (KUD) MINA JAYA DESA TAMBAKREJO SUMBERMANJING WETAN	Nomor : <u>415.4/05/35.07.022/2018</u> Nomor : 03/KMJ/SB/I/2018	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG SEWA MENYEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SINGLE COLD STORAGE DI DESA TAWANGREJENI KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG	2 TAHUN 18-Jan-18 s/d 18-Jan-20	√

No.	Mitra Kerja	Nomor	Bidang Kerjasama	Jangka Waktu	Ket
1	2	3	4	6	
6	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Nomor : <u>002/BSN/MOU/I/2018</u> Nomor : 415.4/06/35.07.022/2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI KABUPATEN MALANG	12 BULAN 29-Jan-18 s/d 29-Jan-19	v
7	FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	Nomor : <u>074/07/35.07.022/2018</u> Nomor : 154/FKIK/KS.02.1/01/2018	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5 TAHUN 23-Jan-18 s.d 23-Jan-23	v
8	PEMERINTAH KOTA BLITAR	Nomor : 134.4/08/35.07.022/2018 Nomor : 003/G01/MCI/I/2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH	1 TAHUN 08-Jan-18 s/d 08-Jan-19	v
9	PT POS INDONESIA (Persero)	Nomor : <u>415.4/09/35.07.022/2018</u> Nomor : 347/ratket/adm penjualan/6/0218	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN MALANG	1 TAHUN 25/01/2018 s/d 25-Jan-19	v
10	PT POS INDONESIA (Persero)	Nomor : <u>415.4/10/35.07.022/2018</u> Nomor : 348/ratket/adm penjualan/6/0218	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN GUDANG DALAM SISTEM RESI GUDANG	2 TAHUN 29-Jan-18 s/d 29-Jan-20	v

No.	Mitra Kerja	Nomor	Bidang Kerjasama	Jangka Waktu	Ket
1	2	3	4	6	
11	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA	Nomor : <u>009.A/NI-DPDTT/PKS/I/2018</u> Nomor : 119/11/35.07.022.2018	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG URUSAN BERSAMA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR MELALUI PROGRAM GENERASI SEHAT DAN CERDAS	12 BULAN 04-Jan-18 s/d 31-Dec-18	v
12	PT POS INDONESIA (Persero)	Nomor : <u>415.4/12/35.07.022/2018</u> Nomor : 2573/Ratket/Adm.penjualan/6/0818	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGIRIMAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2 TAHUN 17-Okt-18 s/d 17-Okt-20	v
13	BPJS KESEHATAN CABANG MALANG	Nomor : <u>415.4/13/35.07.022/2018</u> Nomor : 168/KTR/VII-05/0218	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PERLUASAN KEPESERTAAN PROGRAM JKN-KIS DALAM MEWUJUDKAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE KABUPATEN MALANG TAHUN 2018	1 TAHUN 26 Feb 2018 s/d 26 Feb 2019	v
14	STIKES PATRIA HUSADA BLITAR	Nomor : <u>074/14/35.07.022/2018</u> Nomor : 08/PHB/148/03.18	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PRAKTIK DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5 TAHUN 06-Mar-18 s/d 06-Mar-23	v

No.	Mitra Kerja	Nomor	Bidang Kerjasama	Jangka Waktu	Ket
1	2	3	4	6	
15	DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT	Nomor : <u>05/PKS/SPAM/III/2018</u> Nomor : 119/15/35.07.022/2018	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI IBU KOTA KEC DONOMULYO KABUPATEN MALANG	28-Mar-18 s/d 26-Feb-19	v
16	RSI GONDANGLEGI	Nomor : <u>415.4/16/35.07.022/2018</u> Nomor : 033/BJ/MOU/III/2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN	1 TAHUN 28/03/2018 s/d 28-Mar-19	v
17	KOMANDO DISTRIK MILITER 0818/MALANG-BATU	Nomor : <u>415.4/17/35.07.022/2018</u> Nomor : B/529/IV/2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENINGKATAN POTENSI DAERAH DI KABUPATEN MALANG	1 TAHUN 16/04/2018 s/d 16-Apr-19	v
18	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR	Nomor : <u>510/333/410.108/2018</u> Nomor : 134.4/18/35.07.022/2018	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL	1 TAHUN 18-Apr-18 s/d 18-Apr-19	v
19	UNIVERSITAS MA CHUNG	Nomor : <u>074/19/35.07.022/2018</u> Nomor : 088/MACHUNG/MOU/V/2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH	1 TAHUN 17/05/2018 s/d 17-Mei-19	v

No.	Mitra Kerja	Nomor	Bidang Kerjasama	Jangka Waktu	Ket
1	2	3	4	6	
20	KEMITRAAN ANTARA KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAS REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA	Nomor : <u>/M-DPDTT/KB/III/2018</u> Nomor : 119/20/35.07.022/2018	KEMITRAAN BERSAMA TENTANG KEMITRAAN PRODUK UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN MALANG	1 TAHUN 08-Mar-18 s/d 08-Mar-19	v
21	KEMITRAAN ANTARA KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAS REPUBLIK INDONESIA DENGAN YAYASAN ARTHA GRAHA PEDULI	Nomor : <u>/M-DPDTT/KB/III/2018</u> Nomor : 119/21/35.07.022/2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KEMITRAAN TENTANG KEMITRAAN PRODUK UNGGULAN UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN PERDESAAN DI KABUPATEN MALANG	1 TAHUN 08-Mar-18 s/d 08-Mar-19	v
23	KEMITRAAN ANTARA KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAS REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT.RAJAFARM NUSABAKTI	Nomor : <u>/M-DPDTT/KB/III/2018</u> Nomor : 119/23/35.07.022/2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KEMITRAAN TENTANG KEMITRAAN PRODUK UNGGULAN UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN PERDESAAN DI KABUPATEN MALANG	1 TAHUN 08-Mar-18 s/d 08-Mar-19	v
24	KECAMATAN KARANGPLOSO DENGAN PEMERINTAH DESA DONOWARIH KECAMATAN KARANGPLOSO	Nomor : <u>415.4/24/35.07.022/2018</u> Nomor : 119/0/421.006/2018	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG TENTANG PENGELOLAAN REST AREA DESA AREA DESA DONOWARIH KECAMATAN KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN KABUPATEN MALANG	1 TAHUN 06-Apr-18 s/d 06-Apr-19	v
25	AKADEMI KEPERAWATAN PANTI WALUYA MALANG	Nomor : <u>074/25/35.07.022/2018</u> Nomor : 004/VII/2018/AKP	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAKSANAAN PRAKTEK KLINIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	3 TAHUN 03-Jul-18 s/d 03-Jul-21	v

No.	Mitra Kerja	Nomor	Bidang Kerjasama	Jangka Waktu	Ket
1	2	3	4	6	
26	UNIVERSITAS MA CHUNG PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI	Nomor : <u>074/26/421.022/2018</u> Nomor : 004/MACHUNG/MOA/VII/2018	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PRAKTIK KLINIK, PRAKTIK PROFESI, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI MAHASISWA DI RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG	3 TAHUN 03-Jul-18 s/d 03-Jul-21	v
27	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KENDEDES MALANG	Nomor : <u>074/27/35.07.022/2018</u> Nomor : 771.2.1/MoU/VII/2018	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAKSANAAN PRAKTEK KLINIK, PRAKTEK PROFESI, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	3 TAHUN 03-Jul-18 s/d 03-Jul-21	v
28	PEMERINTAH DESA TIRTO MARTO KECAMATAN AMPELGADING	Nomor : <u>415.4/28/35.07.022/2018</u> Nomor : 415.4/47/35.07.06.2004/2018	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL BAKROTO DI DESA TIRTO MARTO KECAMATAN AMPEL GADING KABUPATEN MALANG	3 TAHUN 10-Jul-18 s/d 10-Jul-21	v
29	YAYASAN SAYANGI TUNAS CILIK	Nomor : <u>415.4/29/35.07.022/2018</u> Nomor : 035.MOU.YSTC.IX.2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGASUHAN ANAK KABUPATEN MALANG	12 BULAN 06-Okt-18	v
30	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Nomor : <u>180/MoU/6/2018</u> Nomor : 035.MOU.YSTC.IX.2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PROGRAM PROFESI KEPAMAONGPRAJAN	12 BULAN 08-Agust-18	v

No.	Mitra Kerja	Nomor	Bidang Kerjasama	Jangka Waktu	Ket
1	2	3	4	6	
31	PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PEMERINTAH KOTA BATU	Nomor : 050/18/35.73.111/2018 Nomor : 119/31/35/07/022/2018 Nomor : 050/16/422.012/2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH	12 BULAN 27-Agust-18	v
32	RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI	Nomor : <u>415.4/32/35.07.022/2018</u> Nomor : 059/BJ/PERJ/VI/2018	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	1 TAHUN 03-Sep-18 s/d 03-Sep-19	v
33	PT. JASA RAHARJA (Persero) CABANG JAWA TIMUR	Nomor : <u>P/431/SP/2018</u> Nomor : 415.4/33/35.07.022/2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENANGANAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM SECARA TERPADU	12 BULAN 10-Jul-18	v
34	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk CABANG KEPANJEN DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk CABANG MALANG	Nomor : <u>119/34/35.07.022/2018</u> Nomor : 057/07/BJ/KPJ/PKS Nomor : 057/35.6/MLG/PN/PKS	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN ANGGARAN 2018	1 TAHUN 04-Mei-18 s/d 04-Mei-19	v
35	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL	Nomor : <u>074/35/35.07.022/2018</u> Nomor : ITN-08.1032/IX.REK/2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH	12 BULAN 09-Agust-18	v



No.	Mitra Kerja	Nomor	Bidang Kerjasama	Jangka Waktu	Ket
1	2	3	4	6	
36	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk  PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nomor : 120.23/36/35.07.022/2018 Nomor : PRJ-34/W13/3/2018 Nomor : 057/417.1/DIR/PGP/MOU	NOTA KESEPAHAMAN TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI KONEKSI TRANSAKSI ANTARA REKENING KAS UMUM DAERAH DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	1 TAHUN 11-Jan-18 s/d 11-Jan-19	v
37	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Nomor : 412/KR.II.K/X/2018 Nomor : 800/37/35.07.022/2018	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TAHUN 2018 DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)	3 BULAN 16-Okt-18 s/d 31-Des-18	v
38	PT. PLN (Persero) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR	Nomor : 415.4/38/35.07.022/2018 Nomor : 0033.Pj/manager/up3-mlg/2018	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN SERTA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	3 TAHUN 27-Nop-18 s/d 27-Nop-21	v
39	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor : 074/39/35.07.022/2018 Nomor : 117/IT3/KsM/2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH	12 BULAN 06-Des-18	v

No.	Mitra Kerja	Nomor	Bidang Kerjasama	Jangka Waktu	Ket
1	2	3	4	6	
40	KABUPATEN KAYONG UTARA	Nomor : 134.4/40/35.07.022/2018 Nomor :			Dalam Proses Menunggu PKS Antara Provinsi Kalbar dan Prov Jatim
41	YAYASAN SAYANGI TUNAS CILIK	Nomor : 415.5/41/35.07.022/2018 Nomor : 043.AGR.YSTC.XI.2018	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGASUHAN ANAK DI KABUPATEN MALANG	3 TAHUN 01-Nop-18 s/d 01-Nop-21	√
42	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor : 074/42/35.07.022/2018 Nomor : 5502/IT3/KsM/2018	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5 TAHUN 06-Des-18 s/d 06-Des-24	√
43	UNIVERSITAS AIRLANGGA	Nomor : 074/43/35.07.022/2018 Nomor : 116/UN3/DN/2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH	12 BULAN 03-Des-18	√
44	YAYASAN SAYANGI TUNAS CILIK	Nomor : 415.5/44/35.07.022/2018 Nomor : 044.AGR.YSTC.XI.2018	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGASUHAN ANAK DI KABUPATEN MALANG	3 TAHUN 01-Nop-18 s/d 01-Nop-21	√

No.	Mitra Kerja	Nomor	Bidang Kerjasama	Jangka Waktu	Ket
1	2	3	4	6	
45	TOPDAM V/BRAWIJAYA	Nomor : 415.4/45/35.07.022/2018 Nomor : B/47/IX/2018	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEY DAN PEMETAAN DI KABUPATEN MALANG	3 TAHUN 26-Sep-18 s/d 26-Sep-21	v
46	BPJS KESEHATAN CABANG MALANG	Nomor : 416/KTR/VII-05/2018 Nomor : 415.4/46/35.07.022/2018	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG INTEGRASI, PEMADANAN DATA BASE KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BASIS DATA TERPADU (BDT) 2017	1 TAHUN 13-Dec-18 s/d 13-Dec-19	v
47	PT. BANK NEGARA INDONESIA	Nomor : 900/47/35.07.022.2018 Nomor : WMA/6.6/008/18/MOU	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN LAYANAN JASA PERBANKAN	12 BULAN	v
48	RS WAVA HUSADA	Nomor : 415.4/48/35.07.022/2018 Nomor : 603/IKS/DIR/2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN MALANG	12 BULAN	v
49	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk CABANG KEPANJEN	Nomor : 973/49/35.07.022/2018 Nomor : 53/91/CML	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH SERTA SISTEM INFORMASI MONITORING	3 TAHUN 26-Dec-18 s/d 26-Dec-21	v

No.	Mitra Kerja	Nomor	Bidang Kerjasama	Jangka Waktu	Ket
1	2	3	4	6	
50	PT. BANK NEGARA INDONESIA	Nomor : 973/50/35.07.022/2018 Nomor : UBM/5.1/1797.1/2018/PKS	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	3 TAHUN 18-Des-18 s/d 18-Des-21	v
51	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN	Nomor : 074/51/35.07.022/2018 Nomor : 1890/LBG/STIKes-KPJ/XII/2018	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH	12 BULAN 11-Des-18	v
52	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN	Nomor : 074/52/35.07.022/2018 Nomor : 1983/LBG/STIKes-KPJ/XII/2018	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PELAKSANAAN PRAKTIK KLINIK, PRAKTIK PROFESI, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	30-Des-18 s/d 30-Des-18	v
53	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA CITA HUSADA MALANG	Nomor : 074/53/35.07.022/2018 Nomor : 1529/S.WCH/800.03/XI/2018	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PELAKSANAAN PRAKTIK KLINIK, PRAKTIK PROFESI, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	12 BULAN 30-Nop-18 s/d	v
54	RS WAVA HUSADA	Nomor : 415.4/54/35.07.022/2018 Nomor : 604/IKS/DIR/2018	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAYANAN AKTA KELAHIRAN, AKTA KEMATIAN, KARTU IDENTITAS ANAK DAN KARTU KELUARGA	2 TAHUN 17-Okt-18 s/d 17-Okt-20	v
55	BPKP PT. BANK JAWA TIMUR (Persero), Tbk	Nomor : 415,4/55/35.07.022/2018 Nomor : PRJ-46/PW13/3/2018 Nomor : 057/08/BJ/KPJ/PKS	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ONLINE ANTARA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH KEUANGAN DENGAN KAS DAERAH	31-Des-18 31-Des-21	

**DATA PERMOHONAN FASILITASI KERJA SAMA  
TAHUN 2018**

NO	NO. SURAT		DARI	PERIHAL	KETERANGAN
1	523/181/35.07.115/2018	34	DINAS PERIKANAN	Surat Pengantar, Naskah Perjanjian Kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Malang dengan KUD Mina Jaya	
2	1768.2.1/MOU/XI/2017	41	Yayasan Kendedes Malang (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan K	Permohonan Perpanjangan Kerjasama	
3	01/SPK/01/2018	39	Direktur CV Zhuravindo	Pengajuan konsep kerjasama	
4	510/074/35.07.113/2018	36	DISPERINDAG	Kerjasama Pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG) antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Pos Indonesia	
5	54/VII-05/0118	68	BPJS Kesehatan Kab.Malang	Surat Pengantar Draft Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan BPJS Cabang Malang tentang Perluasan Kepesertaan Program JKN-KIS dalam mewujudkan Universal Health Coverage Kabupaten Malang Tahun 2018	
6	074.2/168/35.07.107/2018	63	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penawaran Kerjasama Pengiriman Dokumen Kependudukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Malang	
7	134.4/0227/421.010.1/2018	79	SEKDA KOTA BLITAR	Permohonan Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Malang	
8	521/13/35.07.024/2018	72	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	Nota Dinas,Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Rencana Investasi PT.Bintang Mandiri Sejahtera Indonesia di Kabupaten Malang	
9	193/1359/033.4/2018	82	SETDA PROV. JATIM	Tawaran Program J-CLAIR	
10	414.4/305/35.07.119/2018	91	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggapan Penawaran Kerja Sama	
11	017/II/2018/AKP	106	AKADEMI KEPERAWATAN PANTI WALUYA MALANG	Permohonan Kerjasama	
12	360/88/35.07.011/2018	126	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Nota Dinas tentang Penyelesaian/Pemrosesan Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Topografi Daerah Militer V/Brawijaya	
13	B/324/II/2018	145	Komandan KODIM 0818	Pengiriman Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan perjanjian Kerja sama giat wasbang dan ketahanan nasional	
14	168/VII-05/0218	143	BPJS KESEHATAN	Surat Pengantar,Draft Kspktn Brsama Antara Pemkab Mlg Dgn Bpjs Kshn Cbg Mlg Ttg Perluasan Kepesertaan Prgm JKN-KIS Dlm Mewujudkan Universal Health Coverage Kab.mlg Thn.2018.	
15	246/MACHUNG/REKTOR/XII/20	144	Universitas MA CHUNG	Permohonan Kerja Sama	
16	032/YJI/CabMlg/II/2018	138	Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya	Permohonan Kerjasama	
17	690/695/35.07.402/2018	157	PDAM	Permohonan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	
18	910/95/35.07.23/2018	171	Camat Karangploso	Laporan Keuangan Rest Area Karangploso	
19	B/1964/032018	182	BPJS KETENAGAKERJAAN	Usulan Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang	
20	539/1702/35.07.021/2018	192	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Tindak Lanjut Permohonan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengembangan SPAM IKK Donomulyo	
21	510/294/35.07.113/2018	202	DISPERINDAG	Kerjasama Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal	
22	119/402/35.07.208/2018	233,251	RSUD Kanjuruhan Kepanjen	Perjanjian Kerjasama	
23	13/KUI-MR/III/2018	284	Konsorsium Kantor Urusan Internasional Malang Raya	Permohonan Audiensi	
24	Pr-Nr/LSP-PS/Eks/4/IV/2018	304	Direktur LSP Pertanian Seloliman	Penawaran Kerjasama	
25	P/R/08/2018	311	Jasa Raharja Perwakilan Malang	Permohonan Kerjasama Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan	
26	11.4.14/UN32.6/TU/2018	319	Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang	Pengajuan Kerjasama FIK dan DPPKB	
27	1201C/BSN/D2-d/05/2018	323	Badan Standardisasi Nasional	Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Bidang Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kab.Malang	
28	653/224/35.07.111/2018	337	DISPERKIM DAN CIPTA KARYA	Permohonan Fasilitasi Kerjasama antara Pemkab Malang,PT.Kharisma Karangploso dan PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.Cabang Malang	
29	648.11/232/35.07.111/2018	350	DISPERKIM DAN CIPTA KARYA	Permohonan Fasilitasi Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK RTLH)	
30	893.4/2622/35.07.201/2018	398	BKD	Perjanjian Kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten malang	
31	100/345/35.07.011/2018	466	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Permohonan Pengajuan Perjanjian Kerjasama Kegiatan Penetapan Batas Kecamatan dan Pemeliharaan Pilar Batas Kabupaten Malang Tahun 2018	
32	470/1562/35.07.107/2018	467	DISPENDUK & CAPIL	Permohonan Kerjasama Penerbitan Dokumen Kependudukan (KK,Akta Kelahiran, dan Akta Kematian )	
33	050/4641/35.07.202/2018	468	BAPPEDA	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Institut Pertanian Bogor	
34	ITN.07.0897/IX.REK/2018	469	ITN MALANG	Perpanjangan Kesepakatan Bersama	
35	032/1271/35.07.204/2018	470	BPKAD	Draft Perjanjian Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang berupa tanah dan bangunan untuk STIKES Kepanjen	

36	46/MACHUNG/REKTOR/VII/2018	505	Rektor Universitas Ma Chung	Permohonan Kerjasama
37	197/SP/VII/2018	513	PT.Cahaya Bintang Gemilang Abadi	Kerjasama Penanaman Bawang Putih
38	973/1679/35.07.205/2018	532	BAPENDA	Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang
39	411.8/468/35.07.123/2018	577	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	Tindaklanjut MOU antara YSTC dengan Pemerintah Kabupaten Malang
40	500/32/35.07.021/2018	586	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Permohonan Kerjasama PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN)
41	950/1619/35.07.204/2018	599	BPKAD	MOU Tentang Penerapan Kasda Online pada Pemerintah Kab.Mlg
42	973/2083/35.07.205/2018	646	BAPENDA	Draft MoU dan PKS tentang Penyediaan dan Penggunaan Layanan Perbankan
43	119/1450/35.07.208/2018	652	RSUD KANJURUHAN	Surat Pengantar,Perjanjian Kerjasama Antara RSUD Kanjuruhan Kab.Mlg dengan RSI Gondanglegi
44	020/SK-M/IX/2018	654	Direktur Match.Ad (PT.Multi Artiskacithra)	Permohonan Perpanjangan Kerjasama
45	690/3802/35.07.402/2018	664	PDAM Kab.Malang	Permohonan Persetujuan Kerjasama Program Pengembangan Operasional dengan Bank Tabungan Negara
47	973/2232/35.07.205/2018	672	BAPENDA	pengajuan draft perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan dan pengembangan sistem aplikasi e-pajak serta e-monitoring data wajib pajak secara online
48	050/7036/35.07.202/2018	683	BAPPEDA	surat pengantar,draft PKS antara BPJS kesehatan cabang malang dgn pemkab malang ttg integrasi,pemadanan data base kepesertaan JKN untuk peningkatan kualitas plynn bsis data terpadu (BDT) 2017
49	597/UN3.2/DN/2018	687	Sekretaris Univ. Airlangga	permohonan kerjasama
50	074/1859/35.07.204/2018	695	BPKAD	penawaran kerjasama
51	11348/UN10.F08/KS/2018	700	Dekan Fakultas Kedokteran Univ.Brawijaya	permohonan perpanjangan kerja sama antara FKUB dengan RSUD kanjuruhan kepanjen
53	1717/LBG/STIKES-KPJ/XI/2018	713	STIKES KEPANJEN	Permohonan Kerja Sama
54	GARUDA/MLGSS/20046/18	724	Garuda Indonesia	Surat pengantar Draft PKS
55	660/4777/35.07.117/2018	753	Dinas Lingkungan Hidup	Permohonan kerjasama dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Jatim,Tbk untuk pembukaan rekening tampungan retribusi sampah
56	17154/PL17/LL/2018	765	POLITEKNIK NEGERI Jember	permohonan perjanjian kerjasama (MOU)
57	119/1861/35.07.208/2018	768	RSUD Kanjuruhan	surat pengantar kerjasama antara pt jasa raharja (persero) perwakilan malang dan rsud kanjuruhan kab.mlg jangka wktu 5 (lima) th terhitung 12 pkt 2018-11 okt 2023 no.P/R/41/2018
58	1530/S.WCH/800.03/XI/2018	775	STIKES Widya Cipta Husada	perpanjangan ikatan kerjasama antara rsud "kanjuruhan" kepanjen dgn stiekn widya cipta husada malang
59	UP.04 01/1/6110/2018	788	Kementerian Kesehatan RI	Usulan permohonan kontrak kerjasama (MOU)